No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulanan				Realisasi Triwulan				Program	Tolok Ukur Program								Kegiatan	Tolok Ukur Kegiatan								Langkah aksi	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Pelaksanaan				Monitoring dan Evaluasi				Pemantauan	Penanggungjawab
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja dan anggaran		Realisasi Kinerja dan anggaran Tahun 2020 s.d					Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan anggaran		Realisasi Kinerja dan anggaran Tahun 2020 s.d					I	II	III	IV	I	II	III	IV	Target Tercapai/	Penyebab	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Tindak lanjut telah selesai /	
														Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%				Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%															
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan				WTP																																				Kepala BPKAD
											Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	92	855.895.750	99,78	108,5	802.347.339	93,74			Persen	99,07	855.895.750			802.347.339	93,74															Kepala Bidang Perbendaharaan
																				Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah system yang dikelola	sistem	1	411.928.550			402.843.550	97,79	1. Input SPD, 2. Input SP2D, 3. Register SPP,SPM,SP2D, 4. Validasi SP2D, Daftar rekapitulasi dan Pengiriman data SP2D ke DB Antara BJB, Pengiriman data SP2D ke DB Antara BJB, 5. Laporan realisasi penerbitan SP2D, 6. Laporan rekapitulasi transaksi harian.								Target Tercapai	Faktor Penghambat : data salah dan dokumen tidak lengkap	Konfirmasi ke SPKD	Pendampingan perbaikan dan melengkapi dokumen pengajuan	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Belanja dan Pembiayaan
																				Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	372.465.500			330.734.089	88,80	1. Penerbitan SPD, 2. Verifikasi SPM, 3. Penerbitan SP2D, 4. Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran harian, 5. Membuat laporan poisisi kas daerah harian, 6. Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran bulanan, 7. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi, 8. Verifikasi Daftar Transaski Harian, 9. Menyusun RTH, 10. Melaporkan DTH dan RTH ke KPP, 11. Penyusunan Buku Kas Umum Daerah.								Target Tercapai	Faktor Penghambat : data salah dan dokumen tidak lengkap, SKPD telah menyampaikan laporan DTH dan NTPN tidak jelas	Konfirmasi ke SPKD	Pendampingan perbaikan dan melengkapi dokumen pengajuan, Mengirim surat ke Bank Jabr akan menyampaikan laporan transaksi pajak secara rutin setiap bulan	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Pengelolaan Dana
																				Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	SKPD	55	71.501.700	55	100	68.769.700	96,18	1). Pembentukan Tim Teknis, 2). Pendataan Peserta, 3). Penyusunan Materi dan Narasumber, 4). Koordinasi dengan Pihak ke 3 selaku penyelenggara acara, 5). Pelaksanaan Bimtek, dan 6). Penyusunan Laporan Hasil kegiatan Bimtek								Tidak Tercapai	Faktor penghambat : kit pelatihan belum tersedia, narasumber belum dapat memenuhi jadwal yang telah ditetapkan	Pengunduran waktu pelaksanaan	Penjadwalan ulang kegiatan	belum selesai	Kasubid Belanja dan Pembiayaan
												Tingkat Ketepatan waktu penyampaian LK OPD	Persen	90	941.215.600	25	27,78	927.214.700	98,51			Persen	100	941.215.600			927.214.700	98,51														Kepala Bidang Akuntansi
																				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Laporan	1	151.622.000	1	100	148.623.000	98,02	1. Melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan dan Rekonsiliasi Belanja Akhir Tahun untuk LKPD 2019, 2. Melaksanakan Rekonsiliasi Saldo Awal Neraca, Rekonsiliasi Persediaan, dan Rekonsiliasi Neraca untuk LKPD 2019, 3. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Operasional untuk LKPD 2019, 4. Melaksanakan Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Perbandingan LRA dan LO T.A 2019, 5. Melaksanakan Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya T.A 2019, 6. Melakukan Pendampingan Tim Pemeriksa BPK RI atas pemeriksaan Pendahuluan. 7. Melaksanakan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keuangan Unaudited LKPD 2019, 8. … Menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited T.A 2019 ke inspektorat untuk di review : - Membuat dan menyampaikan Surat Pengantar Review, - Membahas Hasil Review								Tercapai	Sebagian SKPD kurang Respon ketika pendampingan pemeriksaan BPK	Koordinasi terus menerus dengan SKPD melalui Media Online serta pemanggilan langsung	Sebelum Pemeriksaan BPK dilaksanakan semua SKPD diberi Informasi Terkait Pelaksanaan Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen atas Laporan Keuangan SKPD yang akan diperiksa	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Pelaporan
																				Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperda, Raperbup	1	139.770.500	1	100	136.108.200	97,38	1. Persiapan Penyusunan Dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD TA 2019, 2. Penyampaian Dokumen rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD TA 2019 ke DPRD, 3. Penyusunan Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, 4. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 pada sidang paripurna DPRD, 5. Menyusun Jawaban Pandangan Umum Fraksi, 6. Sidang Paripurna dalam rangka Jawaban Pandangan umum Fraksi, 7. Melakukan Pembahasan Rancangan Perda, 8. Sidang Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, 9. Penyerahan Raperda hasil persetujuan DPRD ke Provinsi untuk di Evaluasi, 10.								Tercapai	Perbedaan Jadwal dengan agenda DPRD, Proses penandatangan memerlukan waktu yang lama, Waktu yang terlalu singkat dalam penyampaian data dari SKPD, Penjadwalan waktu dengan DPRD dan Lamanyatindak lanjut atas revisi hasil evaluasi Gubernur oleh Bagian Hukum Setda	Koordinasi dengan Sekretariat DPRD, Koordinasi dan Komunikasi yang intens dengan DPRD dan koordinasi dengan Bagian Hukum, Koordinasi dan Komunikasi yang intens dengan SKPD	Menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, Memberikan informasi awal berakhirnya evaluasi Gubernur ke DPRD dan Mengirim Surat ke Bagian Hukum Setda	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Pelaporan

| | | |

																					Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Berita Acara Rekonsiliasi	SKPD	55	95.200.000			90.780.000	95,36	Pejabat Pemanfaatan BMD SKPD membawa 2 rangkap Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang sudah di tanda tangan oleh Kepala SKPD, Pejabat Pemanfaatan BMD dan Petugas Akuntansi ke Bidang Aset. 2). BA Rekonsiliasi Aset beserta lampiran diperiksa oleh pemroses dengan mencocokkan data dan angka pada dokumen-dokumen pendukungnya pada lampiran dengan data yang ada di aplikasi SIMDA BMD. 3). Apabila data dan dokumen sudah sesuai dengan aplikasi SIMDA BMD, maka Berita Acara Rekonsiliasi Aset diverifikasi dan diparaf oleh Kasubid Penatausahaan Aset untuk ditandatangani oleh Kabid Aset. 5). BA Rekonsiliasi Aset beserta berkas pendukungnya dikembalikan ke SKPD 1 rangkap dan 1 rangkap lagi diarsipkan oleh pemroses. Apabila berkas Rekonsiliasi Aset belum sesuai, perlu dikoreksi dan belum lengkap dokumen									Tidak Tercapai	Keterlambatan penyampaian Laporan Aset Tetap	untuk Dinas Pendidikan diharus manyampaikan Laporan Aset Tetap Semester I	Jemput bola dengan melaksanakan pendampingan ke Dinas Pendidikan untuk penyusunan laporan Aset Tetap	belum selesai	Kasubid Pelaporan Aset
																					Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Bimtek	SKPD	55	104.452.000			104.452.000	100,00																	Kasubid Pelaporan Aset
																					Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen Laporan Penatausahaan BMD	Dokumen	1	132.000.000			121.818.000	92,29	1. membuat Surat Edaran maupun Pemberitahuan akan di laksanakan Monev kepada SKPD, 2. Pengumpulan data Rehab Gedung dan Bangunan dari SKPD, 3. Pelaksanaan Monev ke SKPD dan penandatanganan BA Monev, 4. Pelaksanaan Penilaian BMD di tindaklanjuti Pembuatan Berita Acara Penilaian									Tercapai	Penghambat : kelalaian pengurus barang	Memperbaiki KIR	Melakukan pendampingan pembaharuan pemasangan KIR	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Pelaporan Aset
																					Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	Pengembangan Sistem Aplikasi Aset	Sistem	1	231.660.250			228.707.750	########	1). Pejabat Pemanfaatan BMD SKPD membawa dokumen Berita Acara Mutasi Antar SKPD dan SK Penghapusan BMD beserta lampirannya yang sudah ditandatangan oleh Kepala SKPD. 2). Tenaga Administrator Aplikasi SIMDA BMD Bidang Aset memproses mutasi antar SKPD dan penghapusan BMD melalui aplikasi sebagai bahan penyusunan koreksi neraca. 3). Tenaga Administrator SIMDA BMD di Bidang Aset membantu Pejabat Pemanfaatan BMD SKPD dalam menyusun Rekapitulasi dan Rincian Mutasi Aset serta Daftar Mutasi Aset Antar SKPD. 4). Tenaga Administrator Aplikasi SIMDA BMD melaksanakan pemeliharaan dan updating database dan aplikasi.									Target Tercapai	Faktor Penghambat : Gangguan Jaringan	Apabila terjadi gangguan jaringan, maka para pengurus barang mengkases aplikasi di BPKAD melalui jaringan LAN (Local Area Network)	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Pelaporan Aset
																					Inventarisasi Aset	Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	Dokumen	1	197.880.400	1	100	148.886.400	75,24	1. Pembentukan Tim, Pembagian Tugas, 2. Cros Cek Kelapangan data Kondisi Bangunan dan Gedung sebenarnya, 3. Mengukur luas Sebenarnya, 4. Cros Cek Data Alamat sebenarnya secara lengkap															Kasubid Perencanaan Aset
																					Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	Dokumen	1	10.644.532	1	100	10.644.532	100,00	1. Pembentukan Tim, 2. Pengambilan Data Dari Server, 3. Mereklas kode barang, 4. konfirmasi ke setap SKPD, 5. Upload Data Ke server													Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Pelaporan Aset
		Penetapan APBD				Tepat Waktu																																									Kepala BPKAD
										Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Tingkat akurasi Dokumen Penganggaran	Persen	93	512.724.275	91,71	98,61	199233837	38,86			Persen	96,16	512.724.275			199.233.837	38,86																			Kepala Bidang Anggaran

																				Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	Dokumen	4	228.777.000	2	50	156.042.137	68,21	1. Pengumpulan dan pengolahan data, 2. Koordinasi mengenai Penyusunan Raperbup, 3. Asistensi RKA bahan penyusunan Raperbup, 4. Penyusunan Perbup Perubahan Penjabaran APBD									Target Tercapai	Faktor Pendukung : Pergub mengenai tambahan anggaran dari Bantuan Provinsi dan DAU Tambahan berdasarkan PMK, Usulan SKPD, anggaran kegiatan dan SDM, Faktor Penghambat : Kurang akuratnya DPA SKPD	Penyesuaian DPA	Verifikasi usulan data pengusulan pergeseran anggaran	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																				Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	56	190.418.400			29.441.700	15,461584	1. Pengumpulan dan pengolahan data, 2. Rapat persiapan, 3. Pelaksanaan Asistensi RKA SKPD, 4. Penandatanganan RKA oleh TAPD									Target Tercapai	Faktor penghambat : waktu asistensi yang singkat, tidak semua kasubag program dan PPTK hadir pada acara asistensi, Jadwal penandatanganan berbenturan dengan agenda kegiatan TAPD	Percepatan pelaksanaan asistensi, Jadwal penandatanganan disesuaikan dengan agenda kegiatan TAPD	Pelaksanaan Asistensi RKA diluar jam kerja, Penjadwalan ulang	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																				Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	56	93.528.875			13.750.000	14,70	1. Rapat Persiapan pelaksanaan Verifikasi DPA APBD T.A. 2021, 2. Pelaksanaan Verifikasi DPA APBD T.A. 2021, 3. Penandatanganan DPA T.A. 2021 oleh TAPD									Target Tercapai	Penghambat : Verifikasi tidak sesuai jadwal yang ditentukan, agenda TAPD yang padat sehingga menghambat pelaksanaan penandatanganan	Percepatan penandatanganan DPA SKPD/PPKD APBD T.A. 2021	Penjadwalan ulang pelaksanaan penandatanganan DPA SKPD/PPKD APBD T.A. 2021 dengan menyesuaikan agenda TAPD	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
												Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	2.125.681.762	0	0	869.403.851	40,90			Persen	100	2.125.681.762			869.403.851	40,90																Kepala Bidang Anggaran
																				Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	Dokumen	2	207.870.000	2	100	193.515.948	93,09	1. Pengolahan dan pengumpulan data, 2. Rapat Pembahasan oleh TAPD, 3. TAPD menyampaikan Rancangan KUA-PPAS T.A. 2021 kepada Bupati, 4. Bupati menyampaikan Rancangan KUA-PPAS T.A. 2021 kepada DPRD, 5. Melakukan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD T.A. 2021 antara Bupati dengan DPRD, 6. Melakukan Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS APBD T.A. 2021, 7. Penandatanganan KUA dan PPAS APBD T.A. 2021									Target Tercapai	Faktor Penghambat : Masih ada beberapa data yang kurang valid, Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembahasan penyusunan rancangan KUA-PPAS, Adanya koreksi dari Kepala Bupati terhadap Rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan,	Melengkapi data, Penjadwalan kembali rapat pembahasan, Perbaikan sesuai hasil koreksi dari Bupati	Koordinasi dengan sumber data, Dilakukan pembahasan lanjutan, Penyampaian hasil koreksi	Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																				Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	Raperda, Raperbup	1	93.528.875	1	100	62.687.375	67,02	1. Pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A. 2019 oleh TAPD, 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2020 kepada DPRD, 3. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD T.A. 2020 antara Bupati dengan DPRD, 4. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD T.A. 2020 berdasarkan hasil pembahasan,									Target Tercapai	Faktor pendukung : data yang telah diolah untuk pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A. 2020, Raperda APBD T.A. 2020, Tersedianya Raperda APBD T.A. 2020 untuk dibahas, Raperda APBD T.A. 2020 sebagai bahan evaluasi Provinsi	Penyampaian hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A. 2020 ke DPRD, Pembahasan oleh internal DPRD, Koreksi hasil pembahasan, Penyampaian Raperda APBD T.A. 2020 ke Provinsi untuk dievaluasi		Tindak lanjut telah selesai	Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																				Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	Raperda, Raperbup	1	398.355.737	1	100	386.309.340	96,98	1. Pembahasan Raperda APBD oleh TAPD, 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD, 3. Pembahasan Raperda APBD T.A. 2021 antara Bupati dengan DPRD, 4. Penyusunan Raperda APBD berdasarkan hasil pembahasan,										Faktor pendukung : data yang telah diolah untuk pembahasan Raperda APBD T.A. 2021, Raperda APBD T.A. 2021, Tersedianya Raperda APBD T.A. 2021 untuk dibahas, Raperda APBD T.A. 2021 sebagai bahan evaluasi Provinsi		Penyampaian hasil pembahasan Raperda APBD T.A. ke DPRD, Pembahasan oleh internal DPRD, Koreksi hasil pembahasan, Penyampaian Raperda APBD T.A. ke Provinsi untuk dievaluasi		Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran

| | | |